

EFEKTIVITAS MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN DALAM MENYALURKAN DANA SERTIFIKASI GURU DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

Umi Kurniati, M. Chiar, Wahyudi

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP UNTAN Pontianak

Email:umikurnia.76@gmail.com

Abstract

This study is aimed at data collection that utilizes information and communication technology which is expected to be the actual data base nationally in the making of education policy, still much complained by some teachers especially in Sintang District. There are still many teachers who have not been fully recorded so that teacher profession allowances can not be disbursed. qualitative research. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words of people and observed behavior. The results of this study show the Effectiveness of Primary Data Management Data In Distributing Teacher Certification Funds In Sintang District Education Office is still not optimal. Not all schools have Input of Basic Education Data. Not all schools have regularly updating data in Sintang District. Validation and Verification of Dapodik Data by District and School Teams has not been working properly.

Keywords: Effectiveness, Dapodik, Master Certification Fund.

Permasalahan pendidikan menjadi isu nasional bagi bangsa Indonesia untuk meningkat sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan mutu pendidikan agar hasil yang diharapkan akan tercapai. Keberhasilan pendidikan menuntut semua pihak terlibat pemerintah, masyarakat, orangtua siswa atau semua *stakeholder*, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan porsinya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih dan menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah". Sebagai tenaga profesional seorang guru diharapkan

memiliki keahlian, kemahiran atau kecakapan, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005). Mulai tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggunakan data pokok pendidikan (dapodik) sebagai rujukan dalam pengelolaan tunjangan profesi guru. Hal tersebut mengingat berbagai masalah yang muncul berkenaan dengan penyaluran tunjangan sejak pemberian tunjangan tersebut diberlakukan pada 2010 lalu. Ada sembilan indikasi masalah yang terdeteksi berkenaan dengan penyaluran tunjangan profesi guru. Aturan dalam UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan, tunjangan profesi dibayar sebesar 1x gaji pokok. Dengan aturan tersebut, berimbas pada perubahan gaji guru setiap tahun. Masalah lain adalah adanya kenaikan gaji berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 disamping kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan inpassing. Selain itu, data guru yang tidak valid yang disediakan oleh daerah juga mempengaruhi jumlah uang yang dibutuhkan.

Masalah lain adalah guru tidak memenuhi beban kerja minimal 24 jam seminggu dan adanya mutasi guru. Masalahnya adalah data. Apakah datanya akurat atau tidak. Guna mendapatkan data yang valid pengelolaan tunjangan profesi terutama guru SD dan SMP tidak lagi berdasarkan data yang disiapkan pemda, melainkan data pokok pendidikan. Adapun data yang dimasukkan berkaitan dengan satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan siswa. Komponen yang terdapat dalam data pokok pendidikan antara lain, identitas guru, NIP, NRG, NUPTK, tanggal pengeluaran sertifikat, mata pelajaran yang diampu, dan lokasi mengajar. Dengan adanya data pokok pendidikan maka diharapkan tidak ada lagi guru yang berbohong soal data dan pengalokasian dan penyaluran dana sertifikasi guru akan lebih efektif. (Sumarna Surapranata, 2014) Namun, pendataan pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan jadi basis data yang aktual secara nasional dalam pembuatan kebijakan pendidikan, masih banyak dikeluhkan oleh sebagian guru. Masih banyak guru yang belum terdata secara lengkap sehingga tunjangan profesi guru tidak dapat dicairkan. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan guru bersertifikat dan guru penerima tunjangan profesi, penulis tampilkan tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Data Guru Bersertifikat dan Guru Penerima Tunjangan Profesi
Tahun 2016

| No | Jenjang | Guru Bersertifikat Pendidik | Data tidak Valid | Tidak Aktif (Pensiun/wafat/mutasi) | Penerima Tunjangan Profesi |
|----|----------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | TK | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | SD | 1.108 | 29 | 82 | 997 |
| 3 | SMP | 324 | 10 | 11 | 303 |
| 4 | SMA | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 5 | SMK | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | Pengawas | 66 | 0 | 17 | 49 |
| | Jumlah | 1.692 | 39 | 110 | 1.543 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Berdasarkan data di atas maka jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik lebih besar dari jumlah guru yang menerima tunjangan profesi, ini dikarenakan data guru sebanyak 39 orang masih belum valid di data pokok pendidikan dan belum bisa menerima tunjangan profesi dan terdapat guru yang sudah tidak aktif dikarenakan pensiun, mutasi dan wafat sebanyak 110 orang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk memperoleh tunjangan profesi guru akan dikeluarkan surat keputusan pembayaran tunjangan profesi guru (SKTPG) yang berdasarkan data pokok pendidikan. Apabila data tidak akurat, tunjangan profesi guru tidak dapat diterima oleh guru bersertifikat. Pendataan pendidikan secara online lewat data pokok pendidikan masih banyak dikeluhkan banyak guru. Seperti di Kabupaten Sintang masih banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengupload data pokok pendidikan dikarenakan jaringan internet yang tidak ada di daerah-daerah pedalaman. Selain itu, masih kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami IT. Padahal data pokok pendidikan sebagai pegangan pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru bersertifikat.

METODE

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.

Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan efektifitas manajemen data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Peran dan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipatif dan pewawancara. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan bersedia diwawancari tentang Efektifitas manajemen data pokok

pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, dengan menggunakan teknik pengambilan subjek secara acak (*accidental sampling*). Suatu penelitian memerlukan adanya teknik penelitian guna mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Menurut Uray Husna. A (2011:49) "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Sugiono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang dikumpulkan tentu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan semakin memperkuat data hasil penelitian. Menurut Nasution (1992:126) dalam Uray Husna.A (2010:57) Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Menurut Uray Husna.A (2010:55) Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan : 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang biasa, seperti orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, tujuan lain yang diharapkan adalah untuk mendukung peningkatan efisiensi, efektif, dan sinergi kegiatan pengumpulan data pokok yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan untuk digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyatakan sebagai berikut: Tahap awal dalam pengelolaan Dapodik adalah proses input/pengumpulan data. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan menegaskan bahwa Pengumpulan data dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi pendataan Dapodik. Pengisian instrumen aplikasi pendataan Dapodik dilakukan oleh satuan pendidikan dan dikirimkan langsung kepada Kementerian secara periodik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan dinyatakan bahwa data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan data peserta didik

merupakan data yang bersifat individual, relasional dan longitudinal. Data individual merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas pendidikan secara rinci. Data relasional merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas pendidikan. Data longitudinal merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas pendidikan yang sama dalam periode semester tahun ajaran yang berbeda.

Atribut data merupakan informasi data yang melekat pada entitas data pendidikan yang dikumpulkan dalam rangka mendukung tata kelola pendidikan yang akuntabel yang terdiri atau atribut data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan atribut data substansi pendidikan.

Atribut data satuan pendidikan meliputi informasi identitas, lokasi, data pelengkap, data spasial, data citra sarana dan prasarana satuan pendidikan. Atribut data peserta didik meliputi informasi data pribadi, keluarga, prestasi, perkembangan fisik dan aktivitas. Atribut data substansi pendidikan meliputi informasi, materi pembelajaran, penilaian pembelajaran, rombongan belajar, proses pembelajaran, dan kurikulum. Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan data pokok pendidikan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Kebijakan Data Pokok Pendidikan Di
Kabupaten Sintang

| No | Bentuk Sosialisasi | Ada | Tidak ada |
|----|---|-----|-----------|
| 1 | Pengiriman surat resmi ke sekolah-sekolah | √ | |
| 2 | Pengumuman di situs (website) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | √ |
| 3 | Memasang pengumuman di media massa/media sosial | | √ |
| 4 | Melalui forum-forum pertemuan | √ | |
| 5 | Melalui kunjungan Kepala Sekolah/guru-guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | √ | |

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi terkait kebijakan data pokok pendidikan di Kabupaten Sintang pada umumnya melalui pengiriman surat resmi ke sekolah-sekolah, melalui forum-forum

pertemuan serta melalui kunjungan kepala sekolah/guru-guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah disosialisasikan dapodik adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Sekolah Yang Sudah Disosialisasikan Dapodik
Di Kabupaten Sintang

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | Jumlah Sekolah Yang Sudah Disosialisasikan Dapodik | Prosentase |
|----|--------------------|----------------|--|------------|
| 1 | SD | 432 | 321 | 74,31 |
| 2 | SMP | 123 | 98 | 79,68 |
| 3 | SMA/SMK | 46 | 39 | 84,79 |
| | Jumlah/Rata-rata | 601 | 458 | 76,21 |

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017.

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa belum semua sekolah mendapatkan sosialisasi dapodik. Khususnya pada jenjang

pendidikan SD. Jumlah guru yang sudah mengikuti sosialisasi dapodik di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Guru Yang Sudah Mengikuti Sosialisasi Dapodik
Di Kabupaten Sintang

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Guru | Jumlah Guru Yang Sudah Mengikuti Sosialisasi Dapodik | Prosentase |
|----|--------------------|-------------|--|------------|
| 1 | SD | 3827 | 3119 | 81,50 |
| 2 | SMP | 1430 | 1320 | 92,31 |
| 3 | SMA/SMK | 979 | 915 | 93,47 |
| | Jumlah | 6236 | 5.354 | 85,86 |

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa belum semua guru mendapatkan sosialisasi mengenai dapodik. Salah tugas tim pendataan kabupaten adalah penggandaan dan

distribusi CD pendataan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah menerima distribusi CD pendataan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Sekolah Yang Sudah Menerima Distribusi CD Pendataan Di
Kabupaten Sintang

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | Jumlah Sekolah Yang Sudah Menerima Distribusi CD Pendataan | Prosentase |
|--------|--------------------|----------------|--|------------|
| 1 | SD | 432 | 321 | 74,31 |
| 2 | SMP | 123 | 98 | 79,68 |
| 3 | SMA/SMK | 46 | 39 | 84,79 |
| Jumlah | | 601 | 458 | 76,21 |

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017.

Proses pengolahan data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan ditegaskan bahwa satuan pendidikan (sekolah) mempunyai tugas melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Sintang dinyatakan sebagai berikut: Dalam kenyataannya banyak guru yang sudah bersertifikat pendidik tetapi tidak menerima tunjangan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang mengakibatkan tunjangan tunjangan profesi kurang lancar tersalurkan. Tetapi, yang paling utama menghambat adalah verifikasi data. Perlu diketahui tidak semua guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik akan otomatis memperoleh tunjangan profesi. Ada persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh guru. SKTP yang diterbitkan disampaikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi penyaluran tunjangan. Apabila ada perubahan data individu selain data yang terkait dengan beban kerja penerima tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP pada semester berikutnya pada tahun berkenaan dengan

disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan, antar jenis pendidikan dalam satu dinas pendidikan provinsi/ kabupaten /kota, dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan kepada direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) melalui aplikasi dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mendapatkan persetujuan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tempat guru bertugas yang baru, guru yang bersangkutan memperbaiki dapodik dan mengajukan penerbitan SKTP yang baru. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya.

Pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan profesi guru PNSD setelah melakukan verifikasi dan validasi. Tunjangan profesi dibayar oleh provinsi/ kabupaten/kota sesuai tempat terbitnya SKTP penerima tunjangan. Pembayaran dilakukan melalui rekening Guru setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi/

kabupaten/kota wajib membayarkan tunjangan profesi sesuai tempat terbitnya SKTP setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila diketahui adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran tunjangan profesi pada tahun berkenaan, maka tunjangannya dapat disesuaikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berkenaan. Apabila diketahui adanya kelebihan pembayaran tunjangan profesi pada tahun berikutnya, maka guru penerima tunjangan lebih bayar tersebut harus

mengembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi guru jenjang pendidikan menengah yang mengalami kurang atau lebih bayar tunjangan profesi sebelum tahun 2017, diselesaikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengelola data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang diperlukan operator baik di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang maupun di tingkat sekolah. Jumlah sekolah yang sudah memiliki operator di kabupaten sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Jumlah Sekolah Yang Sudah Memiliki Operator di Kabupaten Sintang

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | Jumlah Sekolah Yang Sudah Memiliki Operator | Prosentase |
|----|--------------------|----------------|---|------------|
| 1 | SD | 432 | 298 | 68,99 |
| 2 | SMP | 123 | 81 | 65,86 |
| 3 | SMA/SMK | 46 | 33 | 71,74 |
| | Jumlah | 601 | 412 | 68,58 |

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017.

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam mengelola data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru belum mencukupi. Faktor sumber daya manusia merupakan kendala dalam mengelola data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru. Untuk petugas operator yang berwenang dalam pengoperasian

dapodik, seharusnya dilakukan proses rekrutmen yang baik dan terstandarisasi. Dapodik sebagai program yang bersifat teknis membutuhkan operator yang bisa memahami operasi sistem dapodik dengan baik. Dari hasil penelitian, tidak ada standar kompetensi dan persyaratan yang jelas dari pemerintah untuk rekrutmen petugas operator dapodik.

Pembahasan

Efektifitas manajemen data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengacu kepada pendapat Sedarmayanti (2009: 59) yang menyatakan bahwa

efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi

perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. Selanjutnya, Sedarmayanti, (2009:60) menyatakan bahwa ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu: Input, proses, dan hasil (*output*). *Input* merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir. Proses menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengolah *input*, agar menghasilkan *output* yang bermanfaat. Sedangkan *output* adalah unsur-unsur yang memiliki berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan.

Input merupakan bagian awal dari manajemen pengelolaan data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengolah *input* data pokok pendidikan agar menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi guru yaitu menyalurkan dana sertifikasi guru. Sedangkan *output* adalah produk akhir dari manajemen pengelolaan data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Terkait input data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru maka atribut data pendidik dan tenaga kependidikan meliputi informasi identitas, data

pribadi, alamat, data kepegawaian, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan data aktivitas.

Sosialisasi terkait kebijakan data pokok pendidikan di Kabupaten Sintang pada umumnya melalui pengiriman surat resmi ke sekolah-sekolah, melalui forum-forum pertemuan serta melalui kunjungan kepala sekolah/guru-guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Belum semua sekolah mendapatkan sosialisasi dapodik. Khususnya pada jenjang pendidikan SD. Hasil penelitian juga memperlihatkan belum semua guru mendapatkan sosialisasi mengenai dapodik. Salah tugas tim pendataan kabupaten adalah penggandaan dan distribusi CD pendataan. Selanjutnya, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengolah *input* data pokok pendidikan agar menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi guru yaitu menyalurkan dana sertifikasi guru. Dapodik merupakan data yang dinamis, guru harus melakukan pemutakhiran (*updating*) data-data yang dimilikinya, minimal dua kali dalam satu tahun. Pemutakhiran data ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya perubahan data guru dalam enam bulan, terutama perubahan jam mengajar dan tempat mengajar. Guru harus aktif mendatangi operator dapodik sebagai orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan bertanggungjawab terhadap proses pengolahan data. Hasil penelitian diketahui dalam kenyataannya banyak guru yang sudah bersertifikat pendidik tetapi tidak menerima tunjangan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang mengakibatkan tunjangan tunjangan profesi kurang lancar tersalurkan. Indikator utama menghambat adalah verifikasi data, perlu diketahui tidak semua guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik akan otomatis memperoleh tunjangan profesi, ada

persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh guru.

Dalam proses pengolahan data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga mempunyai tugas memanfaatkan data yang dihasilkan dari dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di tingkat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan satuan pendidikan mempunyai tugas: memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan. *Output* adalah produk akhir dari manajemen pengelolaan data pokok pendidikan dalam menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah ditegaskan mekanisme penyaluran tunjangan profesi melalui sumber data yang digunakan merupakan dapodik yang bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan dalam bentuk surat pertanggungjawaban mutlak.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menerbitkan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) berdasarkan data pada angka 1 sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester satu terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan). Sedangkan tahap 2 (dua) berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember (6 bulan).

SKTP yang diterbitkan disampaikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi penyaluran tunjangan. Apabila ada perubahan data individu selain data yang terkait dengan beban kerja penerima tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP pada semester berikutnya pada tahun berkenaan dengan disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan profesi guru PNSD setelah melakukan verifikasi dan validasi. Tunjangan profesi dibayar oleh provinsi/kabupaten/kota sesuai tempat terbitnya SKTP penerima tunjangan. Pembayaran dilakukan melalui rekening guru setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan pengendalian setiap aktivitas yang ada diperlukan suatu manajemen organisasi yang baik pula. Berfungsi suatu lembaga atau organisasi sangat ditentukan bagaimana tingkat pemanfaatan manajemen dalam organisasi. Hal ini mengingat sumber daya dalam suatu organisasi baik itu sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana perlu diberdayakan seoptimal mungkin. Tindakan manajemen dalam suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan pemimpin dalam menggunakan kepemimpinannya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Penataan manajemen khususnya pada manajemen sumber daya manusia sangat menentukan produktifitas kerja. Semakin besarnya organisasi, maka semakin tinggi tuntutan penganalisaan terhadap perekrutan sumber daya manusia. Pada lembaga pemerintahan juga mengalami hal sama, yakni semakin tingginya tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka lembaga pemerintahan harus mampu

mengelola sumber daya yang ada, baik pada peningkatan disiplin, peningkatan kualitas serta terlebih penataan personalia dan sumber daya lainnya secara baik.

Berdasarkan uraian di atas, kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Proses pengelolaan data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai keinginan sasaran apabila didukung sumber daya manusia yang handal.

Dalam mengelola data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang diperlukan operator baik di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang maupun di tingkat sekolah. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam mengelola data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru belum mencukupi. Faktor sumber daya manusia merupakan kendala dalam mengelola data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru. Untuk petugas operator yang berwenang dalam pengoperasian dapodik, seharusnya dilakukan proses rekrutmen yang baik dan terstandarisasi. Dapodik sebagai program yang bersifat teknis membutuhkan operator yang bisa memahami operasi sistem dapodik dengan baik. Namun, dari hasil penelitian, tidak ada standar kompetensi dan persyaratan yang jelas dari pemerintah untuk rekrutmen petugas operator dapodik.

Jika para petugas operator direkrut dengan kompetensi yang jelas dan paham mengenai teknis teknologi

informasi, maka saat terjadi kendala teknis di lapangan tidak akan membuang waktu dengan berkoordinasi dengan dinas yang akan berdampak dengan lamanya waktu pelayanan yang diberikan. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para petugas operator akan dapat menjadi masukan bagi instansi maupun pemerintah dalam mengembangkan program pengelolaan dapodik untuk menjadi lebih baik lagi. Fasilitas atau perlengkapan kerja dikatakan cukup dalam jumlah apabila peralatan yang tersedia sebanding atau seimbang dengan volume kerja yang ada, atau sebanding dengan jumlah tenaga yang akan menggunakannya, atau sebanding dengan kebutuhan dari organisasi. Peralatan dikatakan efisien jika output yang dikeluarkan haruslah maksimal sedangkan dari sudut input haruslah minimal. Atau dapat disebutkan suatu peralatan disebut efisien apabila penggunaannya tidak membuang-buang energi dan waktu dan tepat untuk suatu tujuan. Peralatan dianggap efektif apabila penggunaannya membawa efek (akibat, pengaruh, keadaan) seperti yang diharapkan. Atau dengan perkataan lain peralatan yang efektif adalah yang tepat dan mempercepat pencapaian tujuan. Sedangkan peralatan dianggap praktis jika dalam penggunaannya mudah dan senang memakainya atau mempergunakannya.

Sarana dan prasarana Kantor merupakan bagian dari unsur manajemen dalam suatu organisasi. Sedarmayanti (2001:15-16) mengemukakan "beberapa unsur manajemen yang terdiri dari manusia, uang, materiil, mesin-mesin, metoda dan pasar sebagai sumber daya yang akan dikelola". Dan salah satu unsur tersebut adalah unsur materiil sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas kantor. Pengelolaan data pokok pendidikan untuk menyalurkan dana sertifikasi guru pada prinsipnya adalah berbasis teknologi informasi. Dapodik

dikirimkan melalui jaringan internet. Memang untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki jaringan internet mereka bisa entry data secara offline terlebih dahulu. Namun, setelah itu sekolah wajib mengirimkan data secara online. Untuk itu sekolah-sekolah pada umumnya harus mencari jaringan internet terdekat atau datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Selain itu, salah satu data wajib yang harus dimiliki oleh guru adalah alamat email masing-masing guru. Untuk guru-guru yang bertugas di daerah perkotaan hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun untuk guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman dan terpencil hal ini tentunya merupakan permasalahan tersendiri. Untuk mengetahui sudah masuk atau tidaknya data guru, setiap guru dapat mengakses situs (website) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan untuk memverifikasi dan memperbaiki datanya melalui dapodik di sekolah masing-masing sebelum dilakukan pencetakan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP). Informasi ini sangat perlu karena guru dapat mengetahui hal-hal yang menghambat penerbitan SKTP disertai informasi rekomendasi perbaikannya sehingga dengan segera guru dapat memperbaiki datanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah. Sebagai program yang menggunakan sarana prasarana infrastruktur yang maju dan modern, pengelolaan dapodik memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Dengan pengalokasian anggaran, maka proses berjalannya suatu kebijakan akan

lancar. Penerapan sistem dapodik yang membutuhkan alokasi biaya besar untuk pengadaan infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian, masih dikeluhkan minimnya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sistem dapodik. Selain anggaran yang minim, kebutuhan tidak hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dapodik, namun juga untuk pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan pengadaan berkas-berkas. Pemerintah Kabupaten Sintang kesulitan untuk mengalokasikan anggaran penerapan dapodik karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dengan membangun infrastruktur teknologi informasi yang modern dan baik. Infrastruktur yang harus dibangun antara lain jaringan komunikasi data dan database yang mampu menyimpan dan memproses data seluruh unsur kependidikan. Wilayah yang luas juga menjadi kendala tersendiri untuk berlakunya integrasi seluruh sekolah yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan aspek Efektifitas Manajemen Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.) Belum semua Sekolah Sudah Entry Dapodik serta Input Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru masih ada kekeliruan. Upaya sosialisasi sudah dilakukan, berupa pengiriman surat resmi ke sekolah-sekolah, melalui forum-forum pertemuan serta melalui kunjungan Kepala Sekolah/guru-guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, bahwa belum semua Sekolah mendapatkan sosialisasi dapodik. Begitu pula dengan guru, belum semua mendapatkan sosialisasi dapodik. 2.) Proses Pengolahan Data Pokok

Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru masih belum optimal. Belum semua Sekolah melakukan pemutakhiran data secara berkala Di Kabupaten Sintang. Validasi dan Verifikasi Data Dapodik oleh Tim Kabupaten maupun Sekolah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. 3.) Hasil (*output*) Pengolahan Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru adalah berupa Penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP). SKTP yang diterbitkan disampaikan ke dinas pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi penyaluran tunjangan. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah melakukan verifikasi dan validasi.

Saran

Berdasarkan aspek Efektifitas Manajemen Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang disarankan sebagai berikut: 1.) Dalam proses Input Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru diharapkan pelaksanaan sosialisasi lebih dapat ditingkatkan hingga ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sintang. Pelaksanaan sosialisasi diharapkan ke aspek-aspek yang lebih teknis khususnya menyangkut mekanisme dan prosedur

input data serta penjelasan tentang data-data apa saja yang harus dipenuhi oleh guru. 2.) Dalam Proses Pengolahan Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru diharapkan Validasi dan Verifikasi Data Dapodik oleh Tim Kabupaten maupun Sekolah lebih dapat ditingkatkan. Salah upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada Pengawas Sekolah maupun Cabang Dinas yang ada di Kecamatan. 3.) Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan diharapkan setiap semester mengevaluasi Hasil (*output*) Pengolahan Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru khususnya terkait Guru yang belum menerima Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP).

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Kasiram 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, UIN-Maliki Press, Malang
- Sedarmayanti 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*
- Sugiyono 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Uray Husna 2011, *Penulisan Karya Ilmiah*, Faruna Bahagia, Pontianak
- Yamit 2003, *Manajemen Produksi dan Operasi*